

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Madrasah merupakan lembaga pendidikan yang lahir dari dan untuk masyarakat, sebab keberadaan madrasah saat ini mempunyai tujuan untuk mencerdaskan kehidupan anak bangsa.¹ Madrasah saat ini lebih banyak dimiliki dan dikelola oleh lembaga masyarakat (Yayasan) daripada oleh pemerintah.

Madrasah merupakan salah satu jenis lembaga pendidikan Islam dengan dinamikanya yang khas, baik *sosiologis*, *psikologis*, *geografis* maupun politis. Diantara ciri khas madrasah dalam konteks pendidikan nasional, berdasarkan undang-undang sistem pendidikan bahwa madrasah merupakan lembaga pendidikan yang bercirikan Islam. Atas dasar inilah, dari awal perkembangannya, madrasah selalu membutuhkan perlakuan yang khas.²

Pendidikan memiliki peran sentral bagi upaya pengembangan sumber daya manusia, karena dari pendidikan kita bisa merubah cara berpikir dan cara bertindak seseorang dari arah yang tidak baik kearah yang lebih baik dan lebih berguna, dan dari cara berpikir dan bertindak itulah kualitas sumber daya seseorang dapat diketahui.³

¹ M. Rais, *Manajemen Marketing Pendidikan Madrasah*, (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu, 2003), hlm, 1.

² Yusuf Umar, *Manajemen Pendidikan Madrasah Bermutu*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2016), hlm, 2.

³ Saondi, Ondi dan Aris Suherman, *Etika Profesi Keguruan*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2010), hlm, 1.

Salah satu masalah yang dihadapi Indonesia dalam bidang pendidikan adalah rendahnya mutu pendidikan. Banyak faktor yang menyebabkan rendahnya mutu pendidikan salah satunya adalah proses pemberian layanan pendidikan yang masih jauh dari harapan. Di satu pihak pemberian layanan pendidikan belum menemukan cara yang paling tepat, di pihak lain pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta semakin tingginya kehidupan masyarakat telah semakin meningkatnya tuntutan kebutuhan hidup sosial masyarakat sebagai pelanggan pendidikan, disamping juga pentingnya pendidikan dan pelatihan yang meningkatkan keterampilan (Herlina, 2017). Pelayanan pendidikan yang bermutu tentu itu amat penting agar konsumen (pelanggan) memperoleh kepuasan layanan dari jasa pendidikan yang diberikan madrasah, sebab para siswa dan masyarakat selaku pelanggan jasa pendidikan menaruh harapan yang besar terhadap madrasah dalam rangka mengantisipasi dan menjawab tantangan kehidupan di masa yang akan datang, terlebih peningkatan mutu pendidikan yang sudah diperoleh belum menggembirakan.⁴

Salah satu permasalahan mendasar pada pengelolaan pembiayaan pendidikan adalah bagaimana sebuah lembaga mampu merencanakan, mengorganisasikan, mengaktualisasikan, dan mengawasi pembiayaan pendidikan agar madrasah dapat berjalan sesuai sistem dan menghasilkan lulusan yang mempunyai daya saing dan cakap. Biaya pendidikan merupakan komponen masukan instrumental yang sangat penting dalam menyiapkan sumber daya

⁴ M. Munir. "Kepuasan Pelanggan Dan Pemilihan Jasa Pendidikan", *Intizam: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, Vol. 3 No. 2 (April, 2020) hlm. 47.

manusia melalui penyelenggaraan pendidikan di madrasah/sekolah. Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah menegaskan bahwa pembiayaan pendidikan merupakan tanggung jawab pemerintah, masyarakat dan orangtua siswa. Disadari bahwa anggaran pembiayaan bukan merupakan satu satunya faktor penentu agar pendidikan lebih berkualitas, namun tanpa pembiayaan yang cukup akan sulit mewujudkan pendidikan yang bermutu dan berkualitas yang dapat dinikmati semua lapisan masyarakat. Sumbangan dana pendidikan baik dari pemerintah maupun perusahaan menuntut pengelolaan yang profesional dan dapat dipertanggungjawabkan, ke pos mana dana tersebut ditempatkan agar berdaya manfaat pada siswa, dan dapat membantu pembiayaan pendidikan yang belum teranggarkan di RAPBM.⁵

Secara aplikatif, penyelenggaraan pendidikan membutuhkan biaya. Hal ini disebabkan pengelolaan pendidikan di sekolah maupun madrasah dalam segala aktivitasnya, memerlukan sarana dan prasarana untuk proses pengajaran, layanan, pelaksanaan program, dan kesejahteraan para guru dan karyawan yang ada. Semua itu memerlukan anggaran dana. Yang menjadi masalah adalah, bagaimana masalah pembiayaan dikelola dengan baik oleh lembaga pendidikan. Lebih dari itu, problem yang sering muncul di permukaan adalah bahwa lembaga pendidikan tidak mampu mengelola dengan baik anggaran yang ada, sehingga mengalami kesenjangan dalam pelaksanaan. Keterbatasan dana menuntut pengelola lembaga

⁵ Fakarotul Karimah, "Manajemen Pembiayaan Dalam Peningkatan Mutu Layanan Pendidikan," *Tesis*, (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2018).hlm. 39.

pendidikan untuk kreatif, peka terhadap peluang, membangun relasi, serta mengelola dana yang ada dengan baik.⁶

Dalam hal pemenuhan Standar Pembiayaan dan dalam rangka Pencapaian Program Pendidikan Menengah Universal (PMU), Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, mulai tahun 2013 telah meluncurkan Program Bantuan Operasional Sekolah Menengah di seluruh Indonesia. Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) ini adalah program utama dari perwujudan program PMU, dengan maksud memberikan bantuan kepada sekolah/madrasah untuk memenuhi biaya operasional sekolah/madrasah dalam rangka memberikan layanan pendidikan yang terjangkau dan bermutu.⁷ Meskipun demikian, berbeda dengan Program Wajib Belajar 9 Tahun yang merupakan amanah dari undang-undang, maka Wajib Belajar 12 Tahun belum ada undang-undangnya serta belum memiliki landasan hukum. Untuk mendukung program BOS Pusat pada sekolah menengah tersebut, maka Pemerintah Provinsi Jawa Barat pada tahun anggaran 2021 menyelenggarakan pemberian Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Provinsi untuk jenjang pendidikan menengah, pada Tahun 2019, 2020 dan tahun anggaran 2021 dilanjutkan dengan pemberian Bantuan Pendidikan Menengah Universal (BPMU) kepada Sekolah-sekolah, dengan mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003, Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas

⁶ Ade Sopiali. "Teori dan Konsep Dasar Pembiayaan (Cost) Dalam Pendidikan Islam", *Jurnal Intelegensia*, Vol. 06 No. 2 (Juli-Desember, 2018) hlm. 103.

⁷ Kemendikbud. Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Sekolah Menengah Atas Tahun 2014 Direktorat Pembinaan SMA.(Jakarta, 2014).

Peraturan Gubernur Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pertanggungjawaban, Pelaporan Serta Monitoring Dan Evaluasi Belanja Hibah Dan Belanja Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat.⁸

Secara khusus pemberian BPMU kepada jenjang SMK/SMA/MA, dilakukan guna membantu sekolah-sekolah/madrasah dalam memenuhi biaya operasional sekolah (Juknis BPMU Provinsi Jawa Barat, 2021) Efisiensi dan efektivitas manajemen pembiayaan Bantuan Pendidikan Menengah Universal (BPMU) Madrasah Aliyah Manba'ul 'Ulum Sindangmekar Dukupuntang Kabupaten Cirebon akan di ukur tingkat keberhasilan penggunaan dana BPMU dalam membiayai semua program yang menjadi prioritas pengembangan madrasah. Indikator keberhasilan tersebut dapat diukur dari proses perencanaan, pengorganisasian, aktualisasi, dan pengawasan/controlling, pembiayaan pendidikan, penyerapan anggaran serta kelancaran proses pembelajaran, baiknya perilaku siswa, prestasi sekolah baik akademik maupun non akademis.⁹

Pembangunan Sumber Daya Manusia merupakan prioritas seluruh elemen pemerintah dalam menyongsong abad-21, untuk itu Pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat pada tahun 2018-2023, memiliki visi yaitu Terwujudnya Jawa Barat Juara Lahir Batin dengan Inovasi dan Kolaborasi. Salah satu ciri utama visi ini

⁸ BPK, "Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban Dan Pelaporan Serta Monitoring Dan Evaluasi Belanja Hibah Dan Belanja Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat," Pergub Prov. Jawa Barat (Jawa Barat: Gubernur Jawa Barat, 2011).

⁹ Fakarotul Karimah, "Manajemen Pembiayaan Dalam Peningkatan Mutu Layanan Pendidikan," *Tesis*, (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2018), hlm. 91.

yaitu inovasi dan kolaborasi. Adapun misi yang hendak dicapai oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dalam hal pembangunan manusia yaitu melahirkan manusia yang berbudaya, berkualitas, bahagia, dan produktif melalui peningkatan pelayanan publik yang inovatif.¹⁰

Untuk merealisasikan hal tersebut perlu dilaksanakan Peningkatan Layanan Mutu, dan Relevansi. Peningkatan Daya Saing, Tata Kelola, Akuntabilitas dan Pencitraan Publik bagi Pendidikan. Untuk penyelenggaraan Pembangunan Sistem Pendidikan Nasional tersebut dilaksanakan pada setiap jalur, jenjang dan satuan pendidikan, melalui berbagai program dan kegiatan pembangunan pendidikan.¹¹

Berdasarkan data dari *cut off* Dapodikdasmen tanggal 31 Agustus 2020 dan data Emis 15 Januari 2020 jumlah sekolah SMA/SMK/SLB/MA penerima Bantuan Pendidikan Menengah Universal (BPMU) sebanyak 5.336 sekolah. Angka Partisipasi Kasar (APK) Jenjang Sekolah Menengah di Jawa Barat menunjukkan baru mencapai 88,02% pada tahun 2019.¹²

Dukungan biaya operasional tersebut direalisasikan melalui Dana Hibah Bantuan Pendidikan Menengah Universal (BPMU) yang merupakan salah satu program Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dalam meningkatkan mutu layanan pendidikan, dana hibah ini diberikan kepada SMA/SMK/SLB Swasta dan

¹⁰ Pemprov. Jawa Barat, “Visi dan Misi Pemerintah Provinsi Jawa Barat”, (Bandung : Visi dan Misi Pemerintah Provinsi Jawa Barat, 2017), hlm. 1.

¹¹ Perpres, “Salinan PP Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan”, (Jakarta : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, 2021), hlm. 5.

¹² Dapodik, “Cut Off Dapodik Untuk Verifikasi DAK Fisik Bidang Pendidikan Tahun 2021”, (Jakarta: Dirjen Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar Dan Pendidikan Menengah Kemdikbud Ristek, 2021), hlm.1.

MA untuk digunakan sebagai dukungan biaya operasional sekolah. Perlu dipahami bahwa anggaran pembiayaan itu bukan merupakan satu satunya faktor yang menentukan pendidikan itu dikatakan berkualitas, namun jika tidak ada pembiayaan yang cukup, maka sulit untuk mengimplementasikan lembaga pendidikan yang bermutu dan berkualitas bagi lapisan masyarakat. BPMU (Bantuan Pendidikan Menengah Universal) yang diperoleh dari pemerintah daerah, harus dimanfaatkan dengan sebaik – baiknya yaitu dengan melakukan pengelolaan yang profesional dan dapat dipertanggungjawabkan.¹³

Dalam penerapannya masih terdapat kesenjangan antara pelaksanaan dengan juknis yang ada, diantaranya adalah ditemukan adanya pengajuan proposal BPMU dengan jumlah data siswa 212 akan tetapi data yang muncul di Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) berjumlah siswa 215 tidak sesuai dengan pengajuan awal yang berarti ditemukan selisih 3 siswa, kurang lengkapnya pelaporan dan pertanggungjawaban BPMU, artinya pengelolaan pembiayaannya masih belum efektif.¹⁴

Berdasarkan pengamatan sementara penulis, maka timbul tanda tanya, mengapa terjadi ketidak efektifan dalam mengelola dana Bantuan Pendidikan Menengah Universal, maka penulis merasa perlu untuk dikaji dan diteliti lebih mudah dan peneliti mencoba memformulasikan dalam sebuah judul Pengelolaan Pembiayaan Bantuan Pendidikan Menengah Universal (BPMU) Dalam

¹³ Pemprov. Jawa Barat, “Tingkatkan Aksesibilitas Pendidikan, Pemda Provinsi Jabar Luncurkan Program Gratis Iuran Bulanan”, (Bandung : Disdik Provinsi Jawa Barat, 2019), hlm. 1

¹⁴ Windraty Ariane Siallagan, “Strategi Pembiayaan Pemerintah Atasi Defisit Pandemi COVID-19”, (Jakarta : Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi DKI Jakarta, 2020), hlm. 1

Meningkatkan Mutu Layanan Pendidikan Di Madrasah Aliyah Manba'ul 'Ulum Sindangmekar Dukupuntang Cirebon.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi masalah diatas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana perencanaan pembiayaan pendidikan BPMU dalam meningkatkan mutu layanan Pendidikan di Madrasah Aliyah Manba'ul 'Ulum Sindangmekar Dukupuntang Cirebon?
2. Bagaimana penerimaan dan pengeluaran pembiayaan BPMU dalam meningkatkan mutu layanan Pendidikan di Madrasah Aliyah Manba'ul 'Ulum Sindangmekar Dukupuntang Cirebon?
3. Bagaimanakah pengawasan pembiayaan pendidikan BPMU dalam meningkatkan Mutu Layanan Pendidikan di Madrasah Aliyah Manba'ul 'Ulum Sindangmekar Dukupuntang Cirebon?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mendeskripsikan perencanaan pembiayaan pendidikan BPMU dalam meningkatkan mutu layanan Pendidikan di Madrasah Aliyah Manba'ul 'Ulum Sindangmekar Dukupuntang Cirebon.

- b. Untuk mendeskripsikan penerimaan dan pengeluaran pembiayaan BPMU dalam meningkatkan mutu layanan Pendidikan di Madrasah Aliyah Manba'ul 'Ulum Sindangmekar Dukupuntang Cirebon.
- c. Untuk mendeskripsikan evaluasi dan pengawasan pembiayaan pendidikan BPMU dalam meningkatkan Mutu Layanan Pendidikan di Madrasah Aliyah Manba'ul 'Ulum Sindangmekar Dukupuntang Cirebon.

2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang jelas dan diharapkan dapat memberikan manfaat secara praktis maupun teoritis, antara lain:

a. Manfaat Teoritik

Hasil penelitian ini secara umum diharapkan dapat memberikan sumbangan khazanah keilmuan Manajemen Pendidikan Islam (MPI). Adapun secara khusus penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan tentang Pengelolaan Pembiayaan Bantuan Pendidikan Menengah Universal (BPMU) dalam Meningkatkan Mutu Layanan Pendidikan.

b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada:

1) Peneliti

Dapat memberikan pengetahuan dan menambah wawasan pengalaman penelitian dalam bidang ilmu pengetahuan dalam meningkatkan mutu layanan pendidikan.

2) Lembaga (IAIN Syekh Nurjati Cirebon)

Sebagai tolak ukur kualitas mutu layanan pendidikan dan dasar dalam meningkatkan kualitas akademik dan kompetensi mahasiswa program pascasarjana Manajemen Pendidikan Islam (MPI).

3) Madrasah

- a) Diharapkan mampu memberikan motivasi dan koreksi bagi pihak madrasah agar terus berupaya meningkatkan mutu layanan pendidikan.
- b) Sebagai bahan masukan dan upaya perbaikan serta peningkatan mutu layanan pendidikan .
- c) Sebagai bahan masukan dan pertimbangan untuk lebih profesional dalam pengelolaan pembiayaan BPMU dalam meningkatkan mutu layanan pendidikan.

4) Pembaca

- a) Memperkaya dan menambah teori-teori dalam dunia pendidikan.
- b) Dapat menjadi acuan dalam pengembangan ilmu pengetahuan.
- c) Dapat bermanfaat dalam memberikan informasi dan pengetahuan mengenai pengelolaan pembiayaan bantuan

pendidikan menengah universal dalam meningkatkan mutu layanan pendidikan.

- c. Bagi masyarakat, peneliti ini berguna untuk menjadi bahan kajian dan diskusi dalam tingkat permasalahan yang sama untuk mencari solusi dari permasalahan yang dihadapi.

D. Sistematika Pembahasan

Dalam pembahasan tesis ini, penulis membuat sistematika dengan praktis yang diharapkan akan mempermudah pembahasan dan pemahaman terhadap isi yang terkandung dalam tesis ini.

Tesis ini terbagi dalam lima bab yang saling berkaitan satu sama lain, dan dalam bab tersebut terisi sub bab sebagai berikut:

Bab I: Pendahuluan merupakan bab berisi uraian yang harus diketahui supaya mengerti dan memahami bab-bab selanjutnya dengan baik. Adapun alasan penulis mengambil judul penelitian terangkum di dalam Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, dan Sistematika Penulisan .

Bab II : Kajian Teori yang berisikan kepustakaan selanjutnya peneliti menuliskan judul Pengelolaan Pembiayaan Bantuan Pendidikan Menengah Universal (BPMU) Dalam Meningkatkan Mutu Layanan Pendidikan Di Madrasah Aliyah Manba'ul 'Ulum Sindangmekar Dukupuntang Cirebon. Dalam bab II diuraikan masalah konseptual dalam penelitian, kemudian di dalamnya

menjelaskan mengenai Pengelolaan Pembiayaan Bantuan Pendidikan Menengah Universal (BPMU) dalam meningkatkan mutu layanan pendidikan. Kemudian bab ini menjelaskan tentang kerangka berpikir kemudian dipaparkan penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini.

Bab III : Metode Penelitian yang didalamnya menjelaskan perihal tempat dan waktu penelitian, metode penelitian, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, dan teknis analisis data.

Bab IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan ini menjelaskan profil MA Manba'ul 'Ulum Sindangmekar Dukupuntang Cirebon sebagai tempat penelitian, kemudian pada bab ini dijelaskan Pengelolaan Pembiayaan Bantuan Pendidikan Menengah Universal (BPMU) Dalam Meningkatkan Mutu Layanan Pendidikan di Madrasah Aliyah Manba'ul 'Ulum Sindangmekar Dukupuntang Cirebon.

Bab V : Penutup menjelaskan kesimpulan tentang Pengelolaan Pembiayaan Bantuan Pendidikan Menengah Universal (BPMU) Dalam Meningkatkan Mutu Layanan Pendidikan di Madrasah Aliyah Manba'ul 'Ulum Sindangmekar Dukupuntang Cirebon. Dalam bab ini juga terdapat saran-saran untuk MA Manba'ul 'Ulum Dukupuntang Cirebon.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN